

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Konsep Agency Theory berdasarkan Scoot (2015) merupakan pengembangan interaksi atau kontrak principal dan agent sebagai pihak manajemen yang bekerja berdasarkan principal, sedangkan principal merupakan pihak yang memperkerjakan agent supaya melakukan tugas dalam kepentingan principal dan agent merupakan pihak kepentingan principal tersebut. Menurut Prinsipal kontrak agen berguna saat bekerja demi tujuan yang dimiliki sebagai akibatnya agen diberi wewenang bagi yang membuat keputusan. Teori keagenan (agency theory) mempunyai interaksi menggunakan perataan laba (income smoothing), mengungkapkan bahwa antara agen dan prinsipal acapkali mempunyai disparitas relevansi (Wury et al., 2020).

Agency theory memberi pengetahuan bahwa pemerintahan (agen) menyerahkan pengelolaan dalam lingkungannya seperti pelaporan keuangan kepada tenaga ahli dibidangnya atau disebut dengan (principal), yang lebih paham akan penyampaian informasi dalam laporan keuangan kepada publik atau pengguna anggaran. Teori ini dapat menambah wawasan dalam menganalisis dan mempelajari bagaimana agency theory dapat memberikan dampak serta hubungan agen dengan principal.

Sesuai dengan hal dijelaskan sebelumnya masalah keagenan dalam akuntabilitas kinerja dalam organisasi pemerintahan ialah sebuah konsep yang berdasarkan teori keagenan. Pemerintah sebagai agent dalam penyajian laporan keuangan. Agent atau sebagai pihak yang bekerja dalam menyampaikan informasi laporan keuangan, pemerintah harus bisa untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat dalam penyajian anggaran yang diperlukan. Selain itu peran pemerintah sebagai agen juga harus menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pegawainya dapat dipercaya serta diyakini oleh publik dalam melaksanakan tujuan anggaran yang telah diberikan. Tujuan anggaran yang jelas dapat membantu meningkatkan efektivitas serta efisiensi anggaran dalam

pemerintah sehingga jelas terlihat digunakan untuk apa saja anggaran yang telah ditentukan meningkatkan efektivitas serta efisiensi anggaran dalam pemerintah sehingga jelas terlihat digunakan untuk apa saja anggaran yang telah ditentukan.

### **2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan**

Akuntansi sektor publik memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Laporan keuangan digunakan dalam organisasi sektor publik agar dapat dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada periode tertentu dan laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas tinggi. Laporan keuangan yang berkualitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang sangat penting dan menjadi keharusan untuk dapat memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dalam sektor publik merupakan suatu hal yang penting dalam menciptakan akuntabilitas dalam lingkup pemerintahan. Pelaporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, harus disajikan secara tepat waktu serta dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan harus menyediakan pengungkapan informasi yang tepat yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Untuk dapat menciptakan akuntabilitas yang baik maka laporan keuangan yang disajikan pun harus berkualitas (Ridzal, 2020).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode. Setiap instansi pemerintahan wajib menyajikan laporan keuangannya dalam satu periode sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan yang telah diatur oleh pemerintah. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas dapat membantu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan penerapannya berbasis akrual laporan keuangan yang dihasilkan dimaksudkan bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan

pemerintah. Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara tepat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik.

Laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki karakteristik yang baik. Karakteristik laporan keuangan (Wiguna et al., 2021) adalah:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dianggap tepat jika informasi yang dikandungnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau sekarang dan memprediksi masa depan, seperti mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi mereka. Informasi pelaporan keuangan yang relevan dapat dikaitkan dengan tujuan penggunaan informasi tersebut. Berikut ini maksud dari informasi relevan (Defitri, 2018):

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), yaitu memungkinkan informasi yang disajikan dapat menjelaskan serta mengevaluasi dugaan dimasa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), yaitu bisa membantu pengguna dalam memperkirakan masa yang akan tiba sesuai dengan output masa lalu dan peristiwa masa kini.
- c. Tepat waktu, yaitu tersaji informasi yang sempurna dan dapat memiliki pengaruh serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu disajikannya informasi secara lengkap yang meliputi semua informasi dalam laporan akuntansi keuangan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta dapat mencegah terjadinya kendala dan kekeliruan pada penggunaan informasi.

2. Andal (reliability)

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, menyajikan setiap fakta dengan jelas, dapat diaudit secara wajar dan dapat diaudit. Informasi andal memiliki karakteristik sebagai berikut (Defitri, 2018):

- a. Penyajian yang jujur, informasi mampu mendeskripsikan dengan jujur transaksi pada suatu peristiwa secara wajar.
  - b. Dapat diverifikasi (verifiability), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diperiksa, dan jika pemeriksaan dilakukan lebih dari sekali oleh subjek yang berbeda, hasilnya bagaimanapun juga menunjukkan kesimpulan yang tidak terlalu berbeda.
  - c. Netralitas, informasi tersebut ditujukan untuk kebutuhan umum dan tidak bersinggungan dengan kebutuhan masing-masing pihak.
3. Dapat Dibandingkan Informasi dalam laporan keuangan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas pelapor lainnya secara keseluruhan.
4. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan pemahaman pengguna. Untuk itu, pengguna

dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi dan operasi entitas pelapor, serta kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang disajikan.

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam melaporkan hasil dari anggaran yang digunakan. Sesuai dengan penjelasan diatas terdapat beberapa karakteristik dalam menentukan kualitas laporan keuangan serta informasi dalam laporan keuangan dengan memperhatikan empat hal yaitu relevan, andal (realibility), dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Jika empat karakteristik tersebut terpenuhi maka laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi syarat laporan keuangan yang berkualitas.

### **2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut (Radinda dan Saleh, 2021):

Kompetensi adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang guna menunjang kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari hasil kinerjanya, sehingga diperlukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam pelaksanaan tugas sesuai jabatannya agar dapat menjalankan tugas tersebut secara efektif, efisien, dan profesional.

Menurut (Ronisimus, 2017) tiga kompetensi utama yang membentuk suatu kompetensi sumber daya manusia antara lain:

1. Pengetahuan adalah suatu hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam suatu pekerjaan dan mengetahui serta memahami di setiap bidang tugas dan tanggung jawab pekerjaan.
2. Keterampilan individu adalah kemampuan untuk melakukan tugas dengan baik dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai seorang pegawai agar dapat menunjang hasil atas apa yang dikerjakan dalam suatu jabatan
3. Sikap kerja adalah etos kerja yang tinggi dengan kreativitas dalam bekerja dan kemampuan merencanakan/mengorganisasikan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46a Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik

yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Sumber daya manusia adalah aset dan kekayaan terpenting dari semua aktivitas manusia. Elemen yang paling penting, adalah manusia, yang dapat dianalisis dan dikembangkan. Waktu, tenaga, dan keterampilannya dapat dimanfaatkan secara optimal tidak hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi juga untuk kepentingan individu.

Sesuai dengan apa yang telah dijabarkan kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi sektor publik dalam menunjang berjalannya roda organisasi. Sumber daya manusia berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan cara meningkatkan kompetensi individu/kelompok. Adapun kompetensi utama yang membentuk suatu kompetensi sumber daya manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

#### **2.1.4. Kejelasan Sasaran Anggaran**

##### **2.1.4.1 Pengertian Anggaran**

Menurut (Yogi et al., 2019)

Anggaran adalah gambaran kuantitatif dari tujuan manajemen dan sebagai alat untuk menentukan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut. Anggaran disusun untuk membantu manajemen mengkomunikasikan tujuan organisasi semua manajer pada unit organisasi di bawahnya, untuk mengkoordinasi kegiatan, dan untuk mengevaluasi kinerja manager sesuai dengan rincian yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi.

Pemikiran strategis dalam organisasi adalah proses di mana manajemen berpikir untuk mengintegrasikan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi.

Kejelasan sasaran anggaran menurut (Aprilianti et al., 2020)

Sejauh mana tujuan organisasi didefinisikan secara jelas dan spesifik, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan anggaran dan mempertanggungjawabkan semua program yang telah dilaksanakan. Kejelasan ini berkaitan dengan uraian tentang sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga anggaran dapat dipahami oleh staf yang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan anggaran.

Berikut tiga hal yang dapat menentukan kejelasan sasaran anggaran (Aprilianti et al., 2020):

1. Pertanggungjawaban Anggaran merupakan komitmen dan kewajiban dalam laporan keuangan yang dapat disertai bukti-bukti sehingga penyusunan anggaran harus dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Perencanaan Anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak. Anggaran memberikan sasaran, target, dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi selama suatu periode tertentu. perencanaan anggaran yang juga akan mempengaruhi kinerja dapat meningkat.
3. Tingkat pengendalian Anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam fungsi pengendalian ini anggaran memiliki manfaat yang saling terkait satu dengan lainnya.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh organisasi sektor publik. Ketidakjelasan sasaran anggaran dapat mengakibatkan pelaksanaan anggaran menjadi tidak teratur serta dapat terjadi ketidakpuasan dalam bekerja. Hal ini disebabkan oleh pelaksana anggaran tidak termotivasi dalam mencapai tujuan kinerja yang diinginkan. Hal ini menjelaskan tentang sejauh mana tujuan anggaran dapat ditetapkan dengan jelas sehingga mudah bagi penanggung jawab pelaksana anggaran untuk lebih memahami kejelasan tujuan anggaran. Anggaran pemerintah daerah erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Fitriana et al., 2018).

#### **2.1.4.2 Tujuan dan Fungsi Anggaran**

Dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tujuan dan fungsi dari anggaran tersebut. Berikut tujuan dari penyusunan anggaran (Sofiani dan Retnani, 2019):

- a. Mengartikulasikan harapan atau tujuan perubahan dengan jelas dan formal untuk menghindari kebingungan dan memberikan arahan untuk apa yang ingin dicapai oleh manajemen.
- b. Mengkomunikasikan harapan manajemen dengan pihak-pihak yang terkena dampak untuk memahami, mendukung, dan melaksanakan anggaran.
- c. Memberikan rencana secara rinci yang ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian serta memberikan arah yang jelas bagi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pemerintah.

- d. Mengkoordinasikan cara atau metode yang digunakan untuk memaksimalkan sumber daya.
- e. Menyediakan sarana untuk mengukur dan memantau kinerja individu dan kelompok dan memberikan informasi yang mendasari perlunya tindakan korektif.

Dalam penyusunan anggaran tentu akan lebih baik jika ditunjang dengan perencanaan yang matang. Sehingga pada tahap pelaksanaan anggaran suatu pemerintah telah terperinci sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut fungsi anggaran (Sofiani dan Retnani, 2019):

- a. Alat penganggaran adalah rencana yang bertindak sebagai panduan bagi anggota organisasi untuk mengambil tindakan. Anggaran menyediakan tujuan, target, dan arah yang ingin dicapai oleh setiap bagian organisasi selama periode waktu tertentu.
- b. Anggaran berguna sebagai alat evaluasi untuk mengetahui apakah kegiatan setiap departemen dalam organisasi telah sesuai dengan rencana.

Sesuai dengan penjelasan diatas anggaran merupakan suatu bentuk perencanaan yang dilakukan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu organisasi. Tujuan dari anggaran adalah agar dapat memaksimalkan kegiatan dengan memperhatikan rincian saat perencanaan anggaran secara spesifik untuk meminimalisir terjadinya kebingungan saat pelaksanaan anggaran. Ketidakjelasan anggaran yang dilaksanakan dapat menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Maka dari itu pemerintah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **2.1.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang artinya dipertanggungjawabkan. Hal ini menggambarkan suatu keadaan serta kondisi yang merupakan perwujudan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi suatu organisasi. “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, prinsip bahwa berhak dan berwenang

untuk menyerahkan dan mengungkapkan tanggung jawab” (Yunita & Christianingrum, 2018).

Akuntabilitas merupakan amanah pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara berkala tentang melaporkan apa, bagaimana, dan mengapa sumber daya dialokasikan untuk tujuan tertentu, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan dikaitkan dengan hasil yang diharapkan dan dicapai.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, konsep akuntabilitas tidak hanya mencakup kewajiban untuk melaporkan hasil kerja, tetapi juga pencapaian tujuan dari apa yang telah dilakukan tentang berhasil atau tidaknya suatu program (Karima, 2021). Konsep ini merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian good governance dalam suatu tatanan pemerintahan. Seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 indikator kinerja adalah ukuran suatu keberhasilan yang dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan guna meningkatkan akuntabilitas dalam lingkup pemerintahan Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Menurut (Fitriana et al., 2018)

Fasilitas pendukung berupa sumber daya yang tersedia bagi individu atau unit organisasi untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas yang diberikan adalah sumber daya. Sumber daya yang dimaksud ini biasanya aparat pemerintah, dana, serta infrastruktur, dan metode kerja yang digunakan. Konsep sumber daya yang terkait dengan negara dapat berupa peralatan pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuatan politik dan hukum.

Sebagai salah satu perwujudan dari akuntabilitas, pemerintahan menyusun sebuah laporan kinerja yang dibuat berdasarkan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam satu periode Konsep akuntabilitas tidak hanya mencakup kewajiban untuk melaporkan hasil kerja, tetapi juga pencapaian tujuan dari apa yang telah

dilakukan tentang berhasil atau tidaknya suatu program (Karima, 2021). Konsep ini merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian good governance dalam suatu tatanan pemerintahan.

**Tabel 2.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**

No	Skala Pengukuran Capaian Kerja	Kategori
1.	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
2.	$70\% \leq X < 85\%$	Berhasil
3.	$55\% < X < 70\%$	Cukup Berhasil
4.	$X \leq 55\%$	Tidak Berhasil

Sumber : *bpkad.sumselprov.go.id*

Laporan Kinerja merupakan gambaran umum yang merangkum serta menjabarkan capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Daerah (APBN/APBD). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut (Soeksin et al., 2020) tiga hal akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas Proses  
Akuntabilitas proses ialah suatu prosedur yang mengacu pada apakah proses yang digunakan untuk melakukan tugas cukup baik dalam hal mengevaluasi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan proses administrasi. Hal tersebut mengacu pada prinsip akuntabilitas yang banyak digunakan oleh organisasi sektor publik.
2. Akuntabilitas Program  
Akuntabilitas program ialah suatu pertimbangan untuk memeriksa apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah program alternatif telah dipertimbangkan yang akan memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
3. Akuntabilitas Kebijakan  
Akuntabilitas kebijakan ialah tanggung jawab dan kebijakan yang diambil dalam politik berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah, baik pusat

maupun daerah, atau kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Sesuai dengan penjelasan akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas berhasil atau tidak suatu program yang telah dilaksanakan. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah organisasi sektor publik harus dapat memenuhi beberapa syarat akuntabilitas diantaranya akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

#### **2.1.5.2 Jenis-jenis Akuntabilitas Publik**

Persyaratan akuntabilitas publik mengharuskan organisasi sektor publik untuk lebih menekankan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), bukan hanya akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*). Dalam hal ini Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembagalembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban.

Menurut Saiful Muchlis (2021:261) akuntabilitas terdiri dari dua macam:

- a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)  
Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh dalam tataran pengelolaan unit kerja akuntansi sektor publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.
- b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)  
Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Sesuai dengan Inpres Nomor 07 Tahun 1999 tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Berikut merupakan sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi.
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai dengan penjelasan diatas dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik harus mampu menetapkan sasaran dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya terhadap publik.. Kejelasan sasaran anggaran yang tidak jelas akan menimbulkan kebingungan dan tidak termotivasinya pegawai dalam mengelola anggaran yang akan direncanakan. Dalam konteks ini organisasi pemerintah melakukan pemberian informasi kepada publik atas aktivitas kerja dalam tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori serta memperluas wawasan yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan variabel yang digunakan yaitu Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kejelasan Sasaran Anggaran berikut merupakan uraian penjelasan tabel 2.1 tentang Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Aisyah Sukarno, Jantje J. Tinangon, Steven J. Tangkuman (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparat Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi	Y : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah X1 : Kompetensi Aparat	Kompetensi Aparat berpengaruh signifikan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil

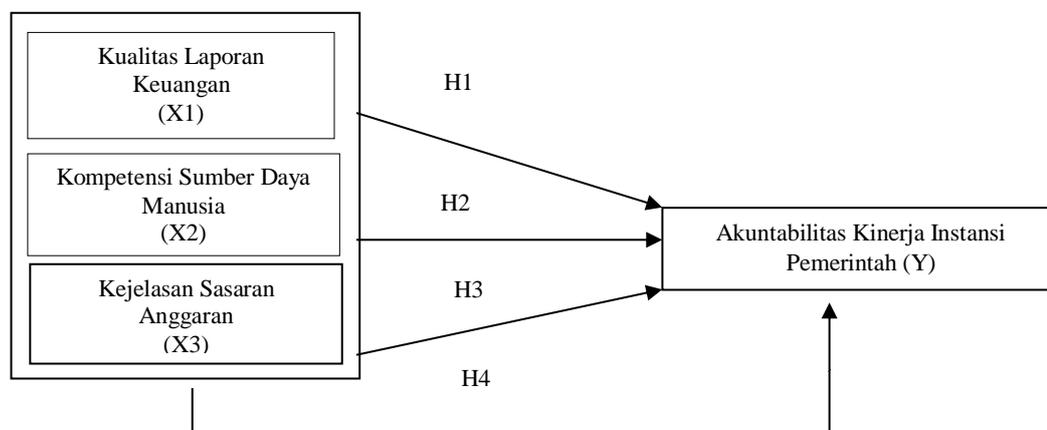
No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara)	X2 : Komitmen Organisasi	analisis juga menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2	Dina Karima, Maslichah, Dwiyanti Sudaryanti (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampan)	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah X1 : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah X2 : Pemahaman Akuntansi X3 : Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan	Secara simultan variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
3	Riska Dwi Fitiana, Nur Hidayati, M. Cholid Mawardi (2018)	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan	Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, variabel Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Widaryanti, Nurul Latifah Pancawardani (2020)	Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah X1 : Pengendalian Akuntansi X2 : Sistem Pelaporan X3 : Kejelasan Sasaran Anggaran	Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Pelaporan berpengaruh dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5	Mukhlisul muzahid (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Y : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah X1 : Kompetensi Aparatur X2 : Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja X3 : Pengawasan Fungsional	Kompetensi Aparatur, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Pengawasan Fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
6	Kusnadi Yudha Wiguna, Anggia Syafitri, Ria Meika Putri (2021)	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau	Y : Akuntabilitas Kinerja X1 : Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	Sasando Dewi Soeksin, Sendy Zul Friandi, Danang Rifai (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tarakan	Y : Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran	Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Partisipasi Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8	Ranti Radinda, Suji Abdullah Saleh (2021)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Jaringan Internet E-SAKIP Terhadap Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung)	Y : Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Pemanfaatan Jaringan Internet E-SAKIP	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Jaringan Internet E-SAKIP sama-sama memiliki pengaruh terhadap Efektivitas SAKIP

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah pertautan antar variabel yang akan secara teoritis menjelaskan tentang hubungan antar variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2019:95). Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagaimana tersaji pada Gambar 4.3.



Sumber : Data yang diolah, 2022

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yang digunakan yaitu Kualitas Laporan Keuangan (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) diduga berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) baik secara parsial (individu) maupun simultan (bersama-sama).

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dalam penelitian, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data statistik yang relevan dengan masalah yang terjadi. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian.

#### 2.4.1 Pengembangan Hipotesis

Pada pengembangan hipotesis ini menggambarkan dengan jelas hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebagaimana disebutkan dalam kerangka penelitian. Berdasarkan penelitian ini peneliti menggunakan empat hipotesis yang sudah dijelaskan. Hipotesis diperoleh dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti, yang kemudian hasil atau jawaban dari hipotesis

tersebut akan diteliti dengan penyebaran kuisioner. Setelah penyebaran kuisioner peneliti mengelompokkan atau mengkategorikan hasil sesuai variabel yang digunakan.

#### **2.4.1.1 Hubungan Kualitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pelaporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dalam menciptakan akuntabilitas publik. Akuntansi sektor publik berperan dalam pengajuan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Agar dapat dipertanggungjawabkan, laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas tinggi agar informasi yang diterima menjadi mudah dipahami oleh pengguna anggaran (Ridzal, 2020). Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H1: Kualitas Laporan Keuangan diduga berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.**

#### **2.4.1.2 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sumber daya manusia adalah penggerak roda dalam suatu organisasi. Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu keahlian yang dimiliki oleh individu atas sekelompok orang yang digunakan untuk mencapai visi dan misi dalam suatu organisasi. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari hasil kerjanya, sehingga diperlukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam pelaksanaan tugas sesuai jabatannya agar dapat menjalankan tugas tersebut secara efektif, efisien, dan profesional (Radinda & Saleh, 2021). Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh hipotesis sebagai berikut

**H2: Kompetensi Sumber Daya Manusia diduga berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.**

### **2.4.1.3 Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Kejelasan sasaran anggaran dibutuhkan untuk dapat mewujudkan anggaran yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kejelasan tujuan anggaran membantu karyawan mencapai kinerja yang diharapkan. Mengetahui sasaran anggaran Anda akan membantu Anda mencapai tingkat kinerja instansi pemerintah (Soeksin et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H3: Kejelasan Sasaran Anggaran diduga berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.**

### **2.4.1.4 Hubungan Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Kejelasan Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya anggaran. Laporan keuangan yang berkualitas dibuat oleh sekelompok orang yang memiliki keahlian pada bidang akuntansi keuangan agar dapat menyajikan informasi yang tepat kepada pengguna anggaran. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia menjadi suatu hal penting guna menunjang penyajian laporan keuangan serta mempertanggungjawabkan kejelasan sasaran anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya agar suatu tujuan organisasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang diharapkan untuk dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik (Ridzal, 2020). Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh hipotesis sebagai berikut

**H4: Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Diduga Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.**